

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Negara republik Indonesia sejak awal kemerdekaan telah menjalankan sistem dan regulasi pemerintahan dengan mengacu pada sistem demokrasi. Meskipun harus diakui bahwa sejarah panjang demokrasi di Indonesia dari masa demokrasi Liberal hingga sampai pada Era Orde Baru cukup banyak menyisahkan kejanggalan, namun perlu disadari pula bahwa sejarah-sejarah kelam itulah yang telah memberikan asupan materi dan pengalaman dan membangkitkan semangat baru dalam kelahiran era Reformasi tahun 1998. Reformasi hadir dalam wajah baru yang di mana membawa banyak perubahan bagi tubuh demokrasi Indonesia. Salah satu bentuk kepedulian pemerintah terhadap penderitaan masyarakat yang tidak pernah diperhatikan selama bertahun-tahun sebelumnya adalah memberikan ruang yang bebas bagi masyarakat untuk mengekspresikan hak politiknya dan selain itu mengubah model pemerintahan yang sebelumnya sentralisasi menuju desentralisasi. Otonomi daerah yang diberikan secara luas secara politis telah membawa keberhasilan dalam mewujudkan mimpi dan tujuan demokrasi. Akan tetapi, pada saat yang sama otonomi daerah juga datang dengan wajah ganda. Otonomi daerah dalam sisi lain membawa keuntungan karena untuk memberikan akses-akses kepada masyarakat tidak lagi memakan waktu yang banyak dan tidak lagi melalui metode-metode yang rumit. Di sisi lain, otonomi daerah menghadirkan *kekhaosan* baru bagi masyarakat dalam hal ini khususnya dalam politik. Masyarakat yang telah diberi kebebasan berekspresi dalam berpolitik tidak dibarengi dengan asupan materi politik yang memadai. hal itu menyebabkan tidak sedikit jumlah warga masyarakat yang melakukan aksi politik yang keliru, eksklusif seperti berpolitik mengatasnamakan agama dan budaya atau praktik politik identitas. Oleh karena itu, beberapa kesimpulan di bawah ini akan sangat penting karena menyangkut makna dari keseluruhan isi tulisan ini dan juga sekaligus menjadi catatan akhir dari tulisan ini.

Membangun komunikasi dialogis di dalam suatu ruang lingkup masyarakat yang plural dengan kadar eksklusivisme yang tinggi sejatinya bukanlah sebuah perkara yang mudah. Lebih pelik lagi jika masyarakat yang menjadi sasaran utama dalam upaya membuka jaringan komunikatif itu secara sadar memilih untuk menutup diri dari segala macam bentuk perbedaan atau menolak kehadiran yang lain, dalam hal ini yang lain yang dimaksudkan adalah orang-orang dengan latar belakang yang berbeda baik suku, budaya, ras dan khususnya pilihan politik. Dalam realitas politik yang berlangsung di tengah kehidupan demokratis masyarakat adat Pel, ditemukan banyak kejanggalan yang di mana kejanggalan-kejanggalan tersebut datang dari dalam atau dari masyarakat adat Pel itu sendiri dan kejanggalan yang datang dari luar yang adalah kaum politisi yang menanamkan nasionalisme sempit atas perilaku politik mereka. Maka dari pada itu, ada beberapa kesimpulan yang ditarik dari keseluruhan isi tulisan yang mengulas realitas dampak destruktif eksklusivisme komunikasi politik masyarakat adat Pel bagi keberlangsungan demokrasi di Indonesia dalam karya ilmiah ini.

Problematika eksklusivisme komunikasi politik masyarakat adat Pel terjadi karena kegagalan mereka dalam melihat realitas politik sebagai sebuah realitas yang mencakup hak-hak masyarakat luas atau universal. Dalam pernyataan lain bahwa realitas eksklusivisme komunikasi politik masyarakat adat Pel pada dasarnya adalah bentuk luapan dari kesadaran mereka yang telah dimanipulasi oleh hukum moral budaya masyarakat adat Pel sendiri. Makna hidup persatuan moral budaya yang dalam hal ini tujuannya hanya untuk segelintir orang kemudian dilegitimasi seakan-akan kebenaran politik itu semata-mata hanya bergantung pada ketentuan-ketentuan hukum moral suatu kelompok masyarakat saja. Maka dari sebab itulah, pentingnya membuka dan membangun usaha edukatif kepada masyarakat dengan tujuan supaya kekeliruan seperti itu tidak lagi terulang dalam kehidupan demokrasi. Selain itu, jika hal ini atau perilaku eksklusif ini terus dibiarkan mengakar di dalam pemikiran masyarakat lantas kemanakan tujuan politik sesungguhnya atau mungkinkah eksklusivisme komunikasi politik mampu menghantar masyarakat kepada kenyataan hidup yang demokratis,

sebagaimana tujuan dari demokrasi pancasila itu sendiri yang adalah mensejahterahkan masyarakat dan menegakan keadilan. Sehingga di sini diperlukan usaha-usaha yang serius baik dari pemerintah nasional, pemerintah adat, mahasiswa dan khususnya semua elemen-elemen dalam politik dari partai politik hingga para aktivis untuk mengedukasi masyarakat adat agar tidak terjebak dalam satu metode pemikiran yang salah.

Selain faktor dari dalam, terdapat pula faktor dari luar yang melatarbelakangi realitas eksklusivisme masyarakat adat Pel tersebut. Faktor yang datang dari luar yang dimaksudkan di sini adalah aktor politik atau kaum politis yang dengan sengaja dan sadar menanamkan nasionalisme sempit kepada masyarakat dengan tujuan untuk mengurangi dan bahkan menutup kemungkinan-kemungkinan masyarakat dalam membuka diri atau menerima kehadiran aktor politis yang berasal dari luar daerah. Dengan menanamkan nasionalisme sempit atas praktik politik terhadap pelaku politik di sini sudah barang tentu hal itu secara langsung membuka ruang yang makin besar terhadap budaya intoleransi dan khususnya dalam kaitanya dengan politik, hal ini akan berdampak langsung pada kualitas demokrasi yang di mana pada akhirnya akan bermuara pada kualitas hidup rakyat sendiri. Sementara itu, perlu disadari bahwa negara Indonesia adalah negara demokrasi yang lebih mengutamakan keadilan, permusyawaratan dan juga berjalan sesuai dengan regulasi Undang-Undang Dasar 1945 yang kemudian termuat dalam Pancasila. Jika berkaca dari sudut pandang konstitusi politik dan prinsip-prinsip demokrasi maka, perlakuan yang tendensinya akan berpotensi melahirkan perpecahan dalam kehidupan bermasyarakat dan merugikan demokrasi mungkin hal ini akan sangat fatal untuk dibumihanguskan dari bumi Indonesia.

Berdasarkan hal tersebut di atas maka disimpulkan bahwa praktik eksklusivisme komunikasi politik masyarakat adat Pel pada umumnya bukan hanya semata berdampak destruktif bagi kehidupan masyarakat adat Pel, tetapi lebih jauh dari pada itu hal itu juga akan berdampak langsung bagi kualitas demokrasi di Indonesia.

5.2. Usul Saran

Masyarakat adat Pel merupakan masyarakat budaya yang masih lekat dan kental dengan penghayatan terhadap nilai-nilai luhur kebudayaannya. Hal ini yang kemudian menjadi satu kendala yang rumit bagi mereka untuk kemudian menyesuaikan dan memilah antara tuntutan moral dan tuntutan hukum universal. Alhasil, tuntutan-tuntutan hukum universal, dalam hal ini ketentuan-ketentuan politik dalam demokrasi yang mencakupi kepentingan dan mengandung nilai kebajikan untuk masyarakat luas kemudian dianggap membbelenggu mereka. Kehadiran politik nasional yang lebih menekankan unsur kebebasan dalam menentukan hak setiap orang menjadi satu konep yang seakan-akan memecahbelah persatuan masyarakat yang telah terikat dalam satu hukum moral budaya tersebut. Menanggapi hal itu, ada pun beberapa saran yang diberikan oleh penulis kepada pembaca, secara khusus kepada masyarakat adat Pel antara lain:

Pertama, masyarakat adat Pel dan juga masyarakat Indonesia mesti terlebih dahulu memahami hakekat politik supaya mereka tidak gegabah dalam mengekspresikan hak-hak politik mereka. Selain itu, memahami letak perbedaan antara hukum moral dan hukum universal bukan semata-mata dipandang sebagai hal sederhana. Masyarakat selaku pelaku politik tentu sudah menjadi dasar dari politik itu sendiri, sehingga apapun keputusan yang mencakup politik semua itu berasal dari hasil partisipasi politik masyarakat. Maka dari sebab itu, untuk menghindari terjadinya kerapuhan demokrasi masyarakat harus membuka diri terhadap tuntutan yang ada dalam politik baik prinsip dan segala regulasinya. Prinsip dasar politik pada umumnya adalah kesetaraan, musyawarah dan kompetitif . Oleh karena itu, membangun komunikasi tanpa ada tindakan diskrimnatif serta membumikan sikap toleransi dalam hal ini menjadi aspek krusial yang harus mendasari beberapa prinsip yang ada. Hanya dengan perilaku seperti itu Indonesia dapat menjadi negara yang sungguh demokratis.

Kedua, selain masyarakat, tentu tidak menutupi kemungkinan bahwa pelaku politik atau aktor politik pun tidak luput dari problem ini. Justru, seharusnya merekalah orang yang menjadi garda terdepan dalam pembangunan politik yang jujur dan kompetitif. Aktor politik dan juga Partai Politik sebenarnya memiliki andil yang sangat

besar dalam mengedukasi masyarakat agar masyarakat tidak terbelenggu dalam pemahaman yang keliru mengenai politik. Bukan aktor politik dan partai politik yang malah menjadi biang dari perilaku eksklusif masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

I. Kamus

Dagun, Save M. *Kamus Besar Ilmu Pengetahuan*. Jakarta: Lembaga Pengkajian Kebudayaan Nusantara, 2000.

II. Buku-Buku

Abidin, Amin Khoirul. *Pengantar Filsafat Kebudayaan*. Hal. 4.

Adnan, H. Indra Muchlis. *Negara Hukum Dan Demokrasi, Dinamika Negara Hukum dalam Sistem Demokrasi Pancasila di Indonesia*. Yogyakarta: Trussmedia Grafika, 2019.

AJ, Tonny. *Wawancara Kembali Demokrasi Pancasila Yang Diperbarui*. Jakarta: Pt. CeraH Budaya Indonesia, 2017.

Bhagi, Silvano Keo. *Negara Bukan-Bukan? Driyarkara tentang Pancasila dan Persoalan Relasi antara Agama dan Negara*. Maumere: Penerbit Ledalero, 2016.

Cohen, Jean dan Andrew Arato. *Civil Society and Political Theory*. Massachuestts: MIT Press, 1996.

Cranston, Maurice. *Hak-Hak Asasi Manusia, Pendasaran Dalam Filsafat Hukum dan Filsafat Politik*, Frans Ceunfin, ed. Cet. II. Maumere: Penerbit Ledalero, 2008.

Deki, Kanisius Teobaldus. *Tradisi Lisan Orang Manggarai, Membidik Persaudaraan Dalam Bingkai Sastra*. Jakarta: Parrhesia Institute, 2011.

Deutsch, W. Karl. *Politics and Government: How People Decide Their Fate*. Bostom: Houghton Mifflin Company, 1972.

- Duka, Agus Alfons, ed. *Voice in the Wilderness, Pesan Paus Yohanes Paulus II Untuk Hari Komunikasi Sedunia Tahun 1979-2005*. Maumere: Penerbit Ledalero, 2007.
- Erb, Marybeth. *The Manggaraians A Guide to Traditional Lifestyle*. Kualalumpur: Times Editorial, 1997.
- Galeoti, Anna Elisabetta. *Pluralisme, Demokrasi dan Toleransi*. Ed. Velix Baghi. Maumere: Penerbit Ledalero, 2012.
- Hardiman, F. Budi. *Massa, Teror dan Terauma; Menggeledah Negativitas Masyarakat Kita*. Maumere: Penerbit Ledalero, 2010.
- JA, Deni. *Mewacanakan Kembalikan Demokrasi Pancasila Yang Diperbarui*. Jakarta: PT. CeraH Budaya Indonesia, 2017.
- Jerry, Efriza Indrawan. *Komunikasi Politik, Pemahaman Secara Teoretis dan Empiris*. Malang: Intrans Publishing, 2018.
- Kleden, Paul Budi. *Catatan Tentang Pemilu, Bukan Doping Politik*. Maumere: Penerbit Ledalero, 2013.
- Koentjananingrat. *Kebudayaan, Mentalitet dan Pembangunan*. Cet-8. Jakarta: Gramedia, 1981.
- Latif, Yudi. *Negara Paripurna, Historisitas, Rasionalitas, dan Aktualitas Pancasila*, Cet. 8. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2021.
- Locke, John. *Two Treatises of Government*. London: Printed for Thomas Tegg, cs., 1823.
- Madung, Otto Gusti. *Politik Diferensiasi versus Politik Martabat Manusia*. Maumere: Penerbit Ledalero, 2011.

- Magnis-Suseno, Frans. *Pijar-Pijar Filsafat, Dari Gatholoco ke Filsafat Perempuan, dari Adam Muller ke Postmodernisme*. Yogyakarta: Kanisius, 2012.
- Merkl, H. Peter. *Continuity and Change*. New York: Harper and Row, 1967.
- Mouffe, Chantal. *The Democratic Paradox*. London-New York: Verso, 2000.
- Mulawan, Rahman. *Sistem Pemerintahan Indonesia*. Bandung: UNPAD Press, 2015.
- Nurudin. *Komunikasi Politik Dalam Masyarakat Tidak Tulus*. Jakarta: Penerbit Prenada, 2020.
- Perwira, Indra. Mei Susanto dan M dan Adnan Yazar Z, Ed. *Hukum, Hak Asasi, dan Demokrasi*. Pusat Studi Kenegaraan Fakultas Hukum Universitas Padjajaran Bandung, 2019.
- Pureklolon, Thomas Tokan. *Komunikasi Politik, Mempertahankan Integritas Akademisi, Politikus, dan Negarawan*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2018.
- Putra, Dedi Kurnia Syah. *Political Social Responsibility, Dinamika Komunikasi Politik Dialogis*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2019.
- Rede Blolong, Raymundus. *Dasar-Dasar Antropologi, Buku Pegangan Mata Kuliah; Manusia dan Kebudayaan Indonesia*. Ende: Penerbit Nusa Indah, 2012.
- Soekanto, Soerjono. *Sosiologi, Suatu Pengantar*. Cet. Ke- 19. Jakarta: Radar Jaya Offset, 1994.
- Sunarko, A. *Ruang Publik-Melacak Demokrasi dari Polis Sampai Cyberspace*. Bud Hardiman, ed. Yogyakarta: Kanisius, 2010.
- Sunarso. *Membedah Demokrasi, Sejarah, Konsep dan Implementasinya di Indonesia*. Yogyakarta: UNY Press, 2015.

Suryani, Haniah Hanafie. *Politik Indonesia*. Jakarta: Penerbit Press, 2011.

Toda, Dami N. *Manggarai Mencari Pencerahan Historiografi*. Ende: Penerbit Nusa Indah, 1999.

III. Jurnal

Doredae, Ansel. “*Peran Gereja Dalam Bidang Pertanahan*”, *Jurnal Ledalero*, Vol. 1. No. 2 Desember, 2002.

Florida, Sasi. “*Kebajikan Intelektual: Fondasi Kebijakan Bagi Mahasiswa Milenial*”. *Akademika Sekolah Tinggi Filsafat Katolik Ledalero-Maumere*, Vol. 15, No. 1, Agustus-Desember 2019.

Koten, Yosef Keladu. “*Politik Pengakuan Atas Kesamaan Dan Perbedaan (Sebuah Tanggapan Atas Artikel Otto Gusti)*”, *Jurnal Ledalero*, 9:1. Ledalero, Juni 2010.

Madung, Otto Gusti. *Politik “Diferensiasi: Memahami Konsep Multikulturalisme Charles Tylor”* *Jurnal Ledalero*, Vol. 9 No. 1, Juni 2010.

Nanto, Rio. *Peradaban Dan Jati Diri Manusia*, *Akademika, Sekolah Tinggi Filsafat Katolik Ledalero-Maumere, Issn 1412-8713., Vol.Xi. No, 2 Januari-Juni 2017.*

Ufen, Marcu Bunte Andreas. *Demokratization in Post- Soeharto Indonesia*, *Routledge Conteporay of Southeast Asian Series*. London: Routledge, 2009.

IV. Internet

Firmansyah, Luky Maulana. *071511533020 (2019) Diskursus Intoleransi Dalam Pilgub Jakarta Tahu 2017 di Media Indonesia, Studi Wacana Kritis pada Kompas. Com, Republika. Co. id, dan Tempo. Skripsi Thesis, Universitas Airlangga*. Diakses pada, 26 Mei 2022.

[http://www.maggaraitimur.go.id/berita/berita/matim/132-implementasi UU No. 7 Tahun 2017](http://www.maggaraitimur.go.id/berita/berita/matim/132-implementasi_UU_No._7_Tahun_2017)
di Kabupaten Manggarai Timur- dorong peningkatan partisipasi masyarakat dalam Pemilu. Diakses pada 28 Mei 2022.

[https://sorotntt.com/keturunan-dalu-riwu-menyikapi-pergantian-nama-kecamatan-di-matim.](https://sorotntt.com/keturunan-dalu-riwu-menyikapi-pergantian-nama-kecamatan-di-matim)
diakses pada 9 November 2021.

<http://id.wikipedia.org/wiki/Sistem-Parlementer>., Artikel diakses pada 27 Februari 2022.

<http://CNNYoutube-Debat Adian Napitupulu Vs Ray Rangkuti Soal Demo Mahasiswa Menolak Jokowi Tiga Periode>, Diakses Pada Mei 3, 2022.

V. Manuskrip

Jebadu, Alexander. “*Panorama Penyelenggaraan Pemerintahan NKRI*” (Penjelasan yang Diberikan dalam Kuliah Politik Otonomi Daerah di IFTK Ledalero (ms), Maumere, 26 Februari 2021.

VI. Wawancara

Adol, Sbinus. *Hasil wawancara*, Pel pada, pada 5 Juni 2021.

Dani, Rivaldus. *interview pada*, 9 Juli 2021.

----- . *Wawancara interview* pada 9 Juli 2021.

Gat Stefanus. *wawancara ainterview*. Pada 20 Juli 2021.

----- . *Wawancara*, Worang, Pel pada, 8 Januari 2022.

Jonas, Petrus. *Wawancara*, Beo Mese pada 16 Juli 2021.

Medi, Salesius. *Wawancara*, Peot pada 20 Juli 2021.

Nggadak, Gaspar. *wawancara* per telepon pada 20 Januari 2022.

Rantu, Nimus. *Hasil Wawancara*, Pel, pada 18 Juni 2021.

----- . *Wawancara*, Golo Pawo, Pel, Poco Ri'i pada 7 Juni 2021.

Said, Bernadinus. *Hasil Wawancara*, Warat, Kelurahan Satar Peot pada, 2 Agustus 2021.

Tamat, Frumen. *Wawancara*, Golo Dendang, Pel, tanggal 15 Juli 2021

----- . *Wawancara* per Telepon, pada 23 Maret 2022.